

## Implementasi Kebijakan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di Kabupaten Sidoarjo

Muhammad Husni Rafif<sup>1</sup>, Agus Sukristyanto<sup>2</sup>, Muhammad Roisul Basyar<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### ABSTRAK

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

[rafifhusni@gmail.com](mailto:rafifhusni@gmail.com)  
[agussukris@untag-sby.ac.id](mailto:agussukris@untag-sby.ac.id)  
[roisulbasyar@untag-sby.ac.id](mailto:roisulbasyar@untag-sby.ac.id)

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo menjadi isu yang mendesak seiring meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah, khususnya melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Goggin. Dalam pelaksanaannya, TPS3R menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dan teknis, serta lemahnya komunikasi kebijakan antara pemerintah dan pelaksana teknis. Dampak dari pengelolaan yang tidak optimal memicu konflik sosial, pencemaran lingkungan, dan resistensi warga, terutama di kawasan padat penduduk seperti Desa Suruh, Trosobo, dan Banjarbendo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan TPS3R di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan efektif karena lemahnya koordinasi antaraktor, komunikasi kebijakan yang belum maksimal, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan lokasi TPS3R sesuai standar teknis, peningkatan kapasitas pengelola, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap kebijakan. Pendekatan kolaboratif dan transparansi kebijakan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan mengurangi konflik antara pemerintah dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan; TPS3R; Pengelolaan Sampah; Partisipasi Masyarakat; Malcolm L. Goggin; Kabupaten Sidoarjo

### ABSTRACT

*The waste management issue in Sidoarjo Regency has become increasingly urgent due to the rising volume of waste caused by population growth and economic activity. This study aims to analyze the implementation of waste management policy, particularly through the Reduce-Reuse-Recycle Waste Management Site (TPS3R), using Goggin's policy implementation theory. In practice, TPS3R faces various challenges, including low community participation, limited human and technical resources, and weak policy communication between the government and field implementers. Improper waste handling has triggered social conflict, environmental pollution,*

\*Corresponding author

E-mail addresses: [rafifhusni@gmail.com](mailto:rafifhusni@gmail.com)

and public resistance, especially in densely populated areas such as Suruh, Trosobo, and Banjarnendo villages.

*This research applies a qualitative approach with descriptive methods. The findings reveal that TPS3R policy implementation in Sidoarjo Regency has not been effective due to poor coordination among actors, inadequate policy communication, and insufficient infrastructure and funding. The study recommends reevaluating TPS3R locations to meet technical standards, enhancing the capacity of waste managers, and actively involving the community at every stage of policy implementation. A collaborative and transparent approach is expected to improve sustainable waste management effectiveness and reduce conflicts between the government and local residents.*

---

**Keywords:** Policy Implementation, TPS3R, Waste Management, Community Participation, Malcolm L. Goggin, Sidoarjo Regency

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan Pengelolaan sampah merupakan isu yang terus menjadi sorotan di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi yang intensif. Kabupaten Sidoarjo, sebagai salah satu daerah penyangga utama Kota Surabaya, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola timbulan sampah yang terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data dari Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kabupaten Sidoarjo menghasilkan lebih dari 313 ribu ton sampah pada tahun 2024, yang sebagian besar belum terkelola secara maksimal. Situasi ini menuntut adanya sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan berbasis pada partisipasi aktif masyarakat.

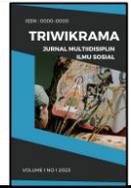
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menginisiasi program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) sebagai salah satu alternatif strategis untuk mengurangi beban sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPS3R diharapkan mampu mengolah sampah sejak dari sumbernya dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pemilahan, daur ulang, dan pengolahan residu. Akan tetapi, pada praktiknya, pelaksanaan TPS3R masih menghadapi beragam hambatan, mulai dari terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, hingga munculnya resistensi dari masyarakat sekitar yang merasa terganggu oleh dampak lingkungan dari pengoperasian TPS3R. Kasus-kasus seperti yang terjadi di Desa Suruh dan Desa Trosobo menunjukkan adanya gesekan sosial yang timbul akibat praktik pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan standar teknis dan belum memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan secara menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS3R di Kabupaten Sidoarjo, dengan fokus pada bagaimana proses komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, serta koordinasi antaraktor dilaksanakan dalam praktiknya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Goggin, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan serta memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

## TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang menentukan dalam siklus kebijakan publik karena di sinilah kebijakan yang telah dirumuskan diuji efektivitasnya di lapangan. Goggin et al. (1990) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Dalam model yang mereka kembangkan, terdapat tiga aspek utama yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya, dan koordinasi antaraktor.

Aspek pertama adalah komunikasi kebijakan. Komunikasi yang dimaksud mencakup bagaimana pesan kebijakan disampaikan dari tingkat pusat kepada pelaksana di tingkat daerah atau lokal. Jika komunikasi tidak berjalan secara jelas, konsisten, dan berkesinambungan, maka sangat mungkin terjadi kesalahan pemahaman atas maksud dan tujuan kebijakan. Hal ini dapat



menyebabkan pelaksana kebijakan tidak memiliki acuan yang tepat dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dirancang.

Aspek kedua adalah sumber daya, yang mencakup ketersediaan dana, tenaga kerja, informasi, peralatan, serta infrastruktur pendukung lainnya. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan tidak akan dapat dijalankan secara efektif, meskipun komunikasi telah berjalan baik. Dalam konteks pengelolaan TPS3R, sumber daya sangat penting untuk mendukung kegiatan operasional seperti pemilahan sampah, pengolahan, hingga distribusi residu ke TPA.

Aspek ketiga adalah koordinasi antaraktor, yang menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan publik, pelaku yang terlibat tidak hanya terbatas pada institusi pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga mencakup perangkat desa, pengelola teknis, serta masyarakat. Koordinasi yang lemah dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik peran, dan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga menguatkan pentingnya ketiga aspek tersebut. Widiyanti et al. (2020) menyoroti kelemahan dalam sistem pengolahan sampah di TPST yang belum dilengkapi teknologi pengendalian pencemaran. Adi et al. (2020) mencatat bahwa pengelolaan aset dan fasilitas masih belum optimal karena keterbatasan sarana serta sumber daya manusia yang kurang kompeten. Sementara itu, Selviyani et al. (2024) menekankan bahwa rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pemicu konflik sosial di sekitar lokasi pengelolaan sampah. Dengan mempertimbangkan teori Goggin serta hasil studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah seperti TPS3R sangat bergantung pada kejelasan komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, serta kekuatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan ketiga aspek tersebut sebagai kerangka analisis dalam menilai implementasi kebijakan TPS3R di Kabupaten Sidoarjo.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menggambarkan secara mendalam realitas sosial mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di Kabupaten Sidoarjo. Metode kualitatif memberikan ruang kepada peneliti untuk memahami fenomena implementasi kebijakan secara alamiah, dengan fokus pada proses, makna, serta interaksi antara aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di dua desa: Desa Suruh, Kecamatan Sukodono, dan Desa Trosobo, Kecamatan Taman. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa keduanya memiliki TPS3R yang telah berjalan namun masih menghadapi kendala teknis dan sosial dalam implementasinya. Kedua desa ini juga mencerminkan kondisi umum pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo yang diwarnai oleh masalah keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pendekatan terbuka dan tersamar untuk memahami aktivitas pengelolaan sampah di lapangan secara langsung. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling, meliputi pengelola TPS3R, perangkat desa, warga sekitar, dan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo. Informan dipilih berdasarkan relevansi pengetahuan dan keterlibatannya dalam pengelolaan sampah di desa. Dokumentasi digunakan



untuk melengkapi data primer dengan informasi sekunder dari arsip kebijakan, laporan kegiatan, berita lokal, serta dokumen peraturan perundang-undangan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahap, yaitu: (1) pengumpulan data, dilakukan selama proses observasi, wawancara, dan dokumentasi; (2) reduksi data, yakni proses memilah dan menyederhanakan data yang relevan agar fokus pada permasalahan penelitian; (3) penyajian data, yang disusun dalam bentuk naratif, tabel, atau grafik agar memudahkan penarikan kesimpulan; dan (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan temuan yang diperoleh valid dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Kerangka analisis dalam penelitian ini merujuk pada teori implementasi kebijakan dari Goggin et al. (1990) yang mencakup tiga dimensi utama: komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan koordinasi antaraktor. Ketiga dimensi ini digunakan sebagai alat untuk membaca sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS3R diimplementasikan secara efektif dalam konteks lokal Kabupaten Sidoarjo.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

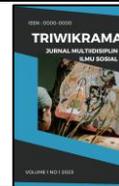
Penelitian Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di Kabupaten Sidoarjo secara umum menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat regulasi yang mendasari, seperti Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022, pelaksanaannya di tingkat desa masih menemui berbagai hambatan. Berdasarkan hasil temuan lapangan di Desa Suruh dan Desa Trosobo, pelaksanaan TPS3R belum sepenuhnya berjalan sesuai standar teknis maupun sosial.

Dari aspek **komunikasi kebijakan**, ditemukan bahwa saluran komunikasi antara pemerintah daerah melalui DLHK dan pengelola TPS3R telah difasilitasi melalui sosialisasi, pembinaan teknis, dan pembentukan tim pengawasan lapangan. Namun, keterbatasan jumlah personel menjadi hambatan tersendiri. Tim sosialisasi dan pengawasan DLHK hanya terdiri dari tujuh orang yang harus mendampingi 18 kecamatan, menyebabkan proses komunikasi bersifat tidak merata dan bergilir. Selain itu, penyampaian informasi kepada masyarakat sering kali tidak sistematis dan lebih mengandalkan jalur informal seperti grup WhatsApp warga atau forum RT, yang menyebabkan informasi kebijakan menjadi kabur, tidak terdokumentasi, dan kadang disalahpahami oleh warga.

Pengelola TPS3R di kedua desa menyampaikan bahwa komunikasi dari DLHK biasanya disampaikan saat kunjungan lapangan atau melalui forum pembinaan. Namun, proses penerusan informasi kepada masyarakat tidak berjalan optimal akibat keterbatasan waktu dan tenaga. Hal ini diperparah dengan kurangnya media informasi tertulis seperti pamflet, papan pengumuman, atau SOP visual di lokasi TPS3R. Akibatnya, warga merasa kurang dilibatkan dan sering kali baru mengetahui aturan setelah muncul masalah, seperti protes akibat asap dari pembakaran terbuka.

Dari sisi **sumber daya**, kedua desa menghadapi tantangan yang hampir serupa. Di Desa Suruh, terdapat empat petugas pengambil sampah, tiga pemilah, dan satu pembakar sampah, dengan sebagian besar tenaga pemilah berasal dari luar desa. Sementara di Desa Trosobo, jumlah personel lebih banyak namun mayoritas menjalankan tugas rangkap. Kedua TPS3R ini juga mengalami keterbatasan dalam pelatihan teknis dan perawatan sarana. Fasilitas seperti tungku berfilter sempat tersedia, namun akhirnya tidak digunakan karena tingginya biaya operasional, sehingga pengelola kembali pada metode pembakaran manual yang menimbulkan polusi.

Dari segi pendanaan, operasional TPS3R mengandalkan iuran warga dan dana desa, namun sering kali tidak mencukupi untuk menutup seluruh kebutuhan. Misalnya, di Desa Trosobo, iuran berkisar Rp22.000-35.000 per KK, tetapi masih membutuhkan tambahan dari BUMDes, yang proses



pencairannya lambat. Ketergantungan pada anggaran desa dan tidak adanya sistem pengelolaan keuangan internal yang mandiri membuat keberlanjutan TPS3R menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan desa atau keterlambatan administrasi.

Dari aspek koordinasi antaraktor, masih terdapat kelemahan signifikan, terutama dalam koordinasi horizontal antara pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat. Meskipun pengelola rutin berkoordinasi dengan DLHK, namun hubungan dengan pemerintah desa sering kali hanya bersifat administratif dan tidak operasional. Hal ini menyebabkan tidak adanya dukungan konkret dari pemerintah desa dalam penyelesaian konflik sosial atau penguatan peran warga dalam pengawasan. Kasus di Desa Suruh dan Desa Trosobo menunjukkan bahwa pengelola menghadapi tekanan langsung dari masyarakat terkait praktik pembakaran dan pencemaran lingkungan, sementara pemerintah desa cenderung tidak mengambil peran sebagai penengah.

Secara umum, jika ditinjau menggunakan model implementasi kebijakan dari Goggin et al., maka dapat disimpulkan bahwa ketiga dimensi utama—komunikasi, sumber daya, dan koordinasi—belum dijalankan secara optimal. Komunikasi kebijakan belum berjalan dua arah secara efektif; sumber daya yang tersedia, baik manusia, sarana, maupun dana, masih terbatas; dan koordinasi antaraktor belum sinergis. Hal ini menjelaskan mengapa implementasi TPS3R di Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, dan justru memunculkan resistensi sosial di beberapa lokasi yang diteliti.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

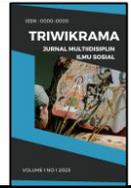
##### **Simpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di Kabupaten Sidoarjo masih belum berjalan secara optimal. Meskipun kebijakan formal telah tersedia dalam bentuk Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022, pelaksanaannya di tingkat desa menghadapi berbagai kendala yang saling berkaitan. Ketiga dimensi dalam teori implementasi kebijakan menurut Goggin, yakni komunikasi kebijakan, sumber daya, dan koordinasi antaraktor, belum dijalankan secara terpadu dan konsisten.

Dari segi komunikasi, penyampaian informasi kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) ke pemerintah desa dan pengelola TPS3R masih bersifat terbatas dan belum merata. Sosialisasi yang dilakukan cenderung tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama warga pendatang, yang justru menjadi kelompok dominan di beberapa wilayah seperti Desa Trosobo. Selain itu, media penyampaian informasi masih bergantung pada saluran informal seperti forum RT atau grup WhatsApp, yang rawan menimbulkan miskomunikasi dan salah tafsir terhadap isi kebijakan.

Sumber daya yang tersedia di lapangan juga tergolong belum memadai. Pengelola TPS3R di Desa Suruh dan Desa Trosobo menghadapi keterbatasan tenaga kerja, minimnya pelatihan teknis, dan sarana prasarana yang tidak selalu sesuai standar teknis pengelolaan sampah. Bahkan, beberapa fasilitas seperti tungku pembakaran berfilter tidak dimanfaatkan secara berkelanjutan karena biaya operasional yang tinggi. Selain itu, sumber pendanaan operasional masih sangat bergantung pada dana desa dan iuran warga, yang sering kali tidak mencukupi dan lambat dalam proses pencairannya.

Dari segi koordinasi, hubungan antara pengelola TPS3R, pemerintah desa, dan DLHK belum terjalin dalam sistem kerja yang terstruktur. Pemerintah desa cenderung pasif dan tidak mengambil peran aktif dalam penyelesaian konflik antara pengelola dan masyarakat. Ketika muncul resistensi sosial dari warga akibat dampak lingkungan, seperti bau atau asap pembakaran, pengelola TPS3R sering



kali harus menghadapi situasi tersebut sendiri tanpa dukungan dari pihak desa atau forum mediasi yang jelas.

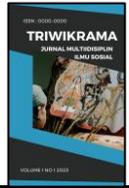
## Saran

Pertama, pemerintah desa bersama DLHK perlu melakukan penguatan sistem komunikasi dan edukasi masyarakat terkait kebijakan pengelolaan sampah, dengan memastikan bahwa informasi yang disampaikan bersifat merata, mudah dipahami, dan menjangkau seluruh lapisan warga, termasuk kelompok pendatang. Pendekatan ini penting agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat administratif (seperti membayar iuran), tetapi juga substantif dalam mendukung kegiatan TPS3R.

Kedua, pengelolaan TPS3R di tingkat desa perlu didukung oleh sistem kelembagaan yang jelas dan didorong untuk memiliki kemandirian pengelolaan. Pemerintah desa diharapkan membentuk struktur pengawasan dan pelaporan yang lebih terintegrasi, serta memberikan pelatihan dan pembinaan secara berkala kepada pengelola TPS3R agar operasional berjalan sesuai dengan standar teknis dan mampu membangun hubungan yang lebih harmonis dengan masyarakat sekitar

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Elsa Rosyidah, K., Irwanto, B., Rosyidah, E., Rahmayanti, A., Noer Hamidah, L., Mansur Yafi, M., Fitriyah, L., & Sumiyarsono, E. (2024). Artikel Nusantara Technology and Engineering Review Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) hingga Tahun 2032. *NTER*, 2(1), 21–27. <https://journal.unusida.ac.id/index.php/nter/>
- Irfan Firmansyah, M. M. (2022). Perencanaan Ulang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 1(6), 835–843. <https://doi.org/10.55123/insologi.v1i6.1193>
- Joko Wahyu Adi, T., Warmadewanthi, I., & Mmai, K. (2020). Evaluasi Kinerja Aset Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Sidoarjo Performance Evaluation of Material Recovery Facility (MRF) Asset in Sidoarjo Regency. In *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* (Vol. 4, Issue 3).
- Nabila Hakim, Y., & Abdullah, S. (2024). Kinerja Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis (Studi di Kecamatan Mandau). In *Yasmin Nabila Hakim dan Syapril Abdullah Journal of Public Administration Review* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar>
- Pelayanan, M., Masyarakat, K., Pemerintahan, D., Wadungasri, D., Waru, K., & Sidoarjo, K. (n.d.). *LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT*.
- Ramadhani Sampurna, E., Rahmatullah Masruchin, F., Nurkholis, A., Fatham Ardiansyah, A., Ramadhana, R., Fachrul Rozi, S., & Febrianto, E. (2022). *E-proceeding 2 nd SENRIABDI 2022 Pemanfaatan Limbah Wisata Baik Organik Maupun Non-Organik. Di Desa Simoketawang, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo* (Vol. 2). <https://jurnal.usahidsolo.ac.id/>
- Selviyani Selviyani, Moh Bahzar, Wingkolatin Wingkolatin, A. Hardoko, Jamil, J., & Marwiah Marwiah. (2024). Implementasi UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Mengatasi Konflik Sosial Masyarakat yang Terjadi di Sekitar TPA Kecamatan Sambutan. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(3), 08–15. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.254>
- Sujatmiko, D. (2019). Optimalisasi Perencanaan Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Cangkringan Sukodono Sidoarjo. In *Bimbingan Swadaya Masyarakat* (Vol. 1, Issue 1).



- Susanto, I., & Sufyanto, S. (2024). Public Communication Strategy in the Protest of Garbage Collector Workers. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1113>
- Tri, A., Cahyandari, S., & Pradana, G. W. (n.d.). *PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP (STUDI UPAYA PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI KABUPATEN SIDOARJO)*. <https://plb3.menlhk.go.id/siraja-limbah->
- Wibisono, G., Nukha, R., & Bina Margiana, D. (2023). SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAMBAK KALISOGO, KABUPATEN SIDOARJO. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 5(1), 73–86. <https://doi.org/10.18326/imej.v5i1.73-86>
- Widiyanti, A., Risah Prayogi, Y., Rosyidah, E., Hamidah, L. N., Rahmayanti, A., & Andhika, A. (2020). PENGELOLAAN PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DAN LINDI DI TPST DESA TULANGAN SIDOARJO. *Journal of Science and Social Development*, 3(2), 17–20.